

WALIKOTA MINTA OPD BANTU BPK



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena meminta kepada semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku dalam melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023. “Setelah penyerahan LKPD kita buat, saya hanya berharap satu, setiap data yang diminta teman-teman pemeriksa wajib diberikan, karena itulah proses yang mesti kita jalani,” tegas Pj. Walikota dalam *entry meeting* pemeriksaan di hadapan Tim BPK di Balai Kota, Rabu (13/3).

Menurut Bodewin Wattimena, BPK selain menentukan sejauh mana LKPD, juga memiliki tanggung jawab lain. BPK juga memiliki tanggung jawab membina, memberikan arahan supaya terjadi perbaikan dalam pengelolaan keuangan. “Saya sangat berharap Bapak/Ibu dalam penyampaian dokumen pemeriksaan, isinya sangat vital dan penting bagi kami dalam melakukan pengujian,” urai Bodewin Wattimena. Hadir juga dalam kegiatan itu, Sekretaris Kita (Sekot) Ambon, Agus Ririmasse, Pimpinan OPD, Para Camat hingga Lurah

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima*, “Walikota Minta OPD Bantu BPK”, 13 Maret 2024, dari artikel: <https://siwalimanews.com/walikota-minta-opd-bantu-bpk/>, Diakses 25 Maret 2024; dan
2. *Teropong News*, “Wattimena Minta OPD Bantu BPK RI Saat Proses Pemeriksaan Keuangan”, 13 Maret 2024, dari artikel : <https://teropongnews.com/2024/03/wattimena-minta-opd-bantu-bpk-ri-saat-proses-pemeriksaan-keuangan/>, Diakses 25 Maret 2024;

Catatan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah:
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. LKPD disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
8. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
9. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
10. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.